

KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2024

Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2024, 13 (4): 751-782

Della Nur Safitri¹, Ahmad Ridwan²

Abstract

This research examines how gender stereotypes shape the social construction of women as leaders, often perceiving them as less competent than men. Focusing on the 2024 East Java Gubernatorial Election, where all candidates are women, the study aims to understand university students' perceptions of women's leadership. It analyzes the influence of patriarchal norms on these perceptions and explores how views may vary based on gender, cultural background, and geography. Utilizing Peter L. Berger's social construction theory, which consists of three stages—externalization, objectivation, and internalization—the study employs a qualitative approach, conducting in-depth interviews. The research involved 12 participants: six students with East Java ID cards and six students from outside East Java who are currently studying in Surabaya. Participants were selected through purposive sampling to ensure representation from various study programs and included individuals aged 18 to 25. This approach aimed to encompass a diverse range of social, educational, and geographical backgrounds. The data were analyzed thematically through processes of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that gender stereotypes remain a significant obstacle, particularly among male students who tend to be skeptical of women's leadership abilities. However, progressive views are starting to emerge, especially among female students and the younger generation, who evaluate leadership based on individual competence rather than gender. The 2024 East Java gubernatorial election is viewed as a crucial opportunity to shift the patriarchal social construct toward greater gender equality.

Keywords: *Gender, Governor, Social Construction, leader, Women, politics*

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana konstruksi sosial terhadap perempuan sebagai pemimpin sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender yang menganggap perempuan kurang kompeten dibandingkan laki-laki. Dalam konteks Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024, di mana seluruh kandidat adalah perempuan, penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap konstruksi sosial tentang kepemimpinan perempuan. Studi ini juga menganalisis pengaruh norma-norma patriarkal terhadap pandangan mahasiswa serta mengeksplorasi potensi perubahan persepsi berdasarkan gender, latar belakang budaya, dan geografis. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, yang membagi konstruksi sosial ke dalam tiga tahapan: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan metode wawancara

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya

¹ della.23186@mhs.unesa.ac.id

mendalam. Penelitian melibatkan 12 Informan terdiri dari 6 mahasiswa dengan KTP Jawa Timur dan 6 mahasiswa dari luar Jawa Timur yang saat ini berkuliah di Surabaya. Informan dipilih secara purposive sampling dengan kriteria berasal dari berbagai program studi dengan usia 18-25 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk mencakup variasi latar belakang sosial, Pendidikan dan geografis. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa stereotip gender masih menjadi kendala signifikan, terutama di kalangan mahasiswa laki-laki yang cenderung skeptis terhadap kemampuan perempuan memimpin. Namun, pandangan progresif mulai muncul, terutama di kalangan mahasiswa perempuan dan generasi muda, yang menilai kepemimpinan berdasarkan kompetensi individu, bukan gender. Pemilihan gubernur Jawa Timur 2024 dipandang sebagai momentum penting untuk menggeser konstruksi sosial patriarkal menuju kesetaraan gender yang lebih inklusif

Kata Kunci: Gender, Gubernur, konstruksi sosial, pemimpin, Perempuan, politik

PENDAHULUAN

Konstruksi sosial terhadap Perempuan sebagai pemimpin telah lama menjadi isu yang diperdebatkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Persepsi yang sering kali melekat bahwa Perempuan tidak cocok menjadi pemimpin didasarkan pada stereotip gender dan norma patriarkal yang menganggap Perempuan lebih emosional dan lemah dibandingkan laki-laki. Stereotip ini telah menempatkan Perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam ranah public, termasuk politik.

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pemimpin (orang yang menjalankan kepemimpinan). Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang menyebabkan geraknya suatu organisasi atau instansi. Pada dasarnya kepemimpinan tidak membedakan pelakunya, apakah dilakukan laki-laki atau perempuan. Sebab keduanya mempunyai syarat yang sama untuk bisa disebut sebagai pemimpin yang baik. (Handayani et al., 2024).

Selama ini, pemahaman masyarakat Indonesia merekonstruksi bahwa secara kodrat, perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga untuk menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga tetap diserahkan kepada laki-laki. Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki pada peran domestik (Gusmansyah et al. n.d.). Di Indonesia Hingga saat ini Megawati Soekarnoputri menjadi satu-

satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia. Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden kelima Indonesia dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Hal ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. Perempuan harus menghadapi banyak serangan berbasis gender yang mempertanyakan emosionalitas dan kompetensinya, meskipun ia memiliki pengalaman yang panjang dalam politik.

Konstruksi sosial ini tidak hanya berlaku pada negara berkembang tetapi juga terjadi di negara maju. Misalnya, Hillary Clinton yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat pada 2016, kemudian ada Kamala Harris yang mencalonkan diri menjadi presiden Amerika pada tahun 2024 dimana ia sering dilemahkan dengan narasi yang meragukan kredibilitas atau ketegasannya sebagai pemimpin. Perempuan yang akan menduduki atau sudah menduduki posisi kepemimpinan sering menghadapi hambatan kultural dan stereotip gender. Namun, dinamika politik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menarik, terutama dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024, di mana semua kandidat yang maju adalah perempuan. Fenomena ini membuka ruang diskusi untuk memahami bagaimana konstruksi sosial terhadap perempuan sebagai pemimpin terbentuk dan apakah fenomena ini dapat menggeser pandangan masyarakat.

Konstruksi sosial tersebut muncul karena adanya bias gender yang terjadi sebenarnya bersumber juga dari kurang pemahamannya masyarakat tentang perbedaan jenis kelamin dan gender. Bias gender adalah kondisi dimana masyarakat menganggap persoalan gender dianggap sebagai persoalan jenis kelamin. Contohnya masih ada perdebatan apakah perempuan boleh bekerja di luar rumah atau harus mengurus rumah tangga? Perdebatan ini muncul karena ada anggapan di masyarakat bahwa perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan laki-laki bekerja di kantor adalah takdir. Padahal pembagian pekerjaan seperti itu bukanlah takdir tetapi peran sosial yang dibentuk. Kesulitan untuk membedakan apakah ini persoalan takdir atau persoalan peran sosial yang dibentuk inilah yang dikenal dengan bias gender. Bias gender ini juga bersumber dari ketidakpahaman masyarakat membedakan jenis kelamin dan gender (Astuti, Studi, and Fakultas 2020).

Perempuan di konstruksikan lebih cocok berada di ranah domestik, sementara laki-laki dipandang sebagai sosok rasional, kuat, dan lebih layak memimpin. Pandangan ini tidak hanya diperkuat oleh budaya patriarki tetapi juga oleh media dan narasi publik yang sering mengesampingkan peran perempuan dalam posisi strategis. Dalam artikel UNAIR News pada oktober 2019, Siti Mas'udah, S.Sos., M.Si., dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, mengungkapkan bahwa partisipasi Perempuan dalam politik masih sangat terbatas. Masyarakat cenderung memilih pria sebagai calon pemimpin dan menganggap politik sebagai domain laki-laki.

Menyertakan peran dan partisipasi politik perempuan di partai politik menjadi hal yang mutlak dan wajib dilakukan oleh semua partai politik. Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk sekaligus menjadi faktor pendorong bagi perempuan tentunya untuk bisa menyalurkan aspirasi dan kualitas dari dirinya (Pemerintahan and Politik 2020). Dalam politik, kesetaraan gender berarti memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan dan program pemerintah. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat (Ilmu et al. 2023).

Tabel 1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022-2023

Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	
	2023	2022
Pacitan	17,78	15,56
Ponorogo	13,33	13,33
Trenggalek	6,67	6,67
Tulungagung	18,00	14,00

Blitar	24,00	26,00
Kediri	22,45	22,00
Malang	22,00	22,00
Lumajang	16,00	16,00
Jember	18,00	18,00
Banyuwangi	26,00	26,00
Bondowoso	11,11	11,11
Situbondo	28,89	31,11
Probolinggo	26,00	26,00
Pasuruan	10,20	12,00
Sidoarjo	16,00	16,00
Mojokerto	30,00	28,57
Jombang	24,00	24,00
Nganjuk	32,00	26,00
Madiun	24,44	22,22
Magetan	15,56	15,56
Ngawi	28,89	26,67
Bojonegoro	10,00	10,00
Tuban	14,00	14,00
Lamongan	22,00	24,00
Gresik	18,75	18,00
Bangkalan	8,00	8,00
Sampang	8,89	6,67
Pamekasan	4,44	4,44
Sumenep	8,00	8,33
Kota Kediri	40,00	36,67

Kota Blitar	12,00	12,00
Kota Malang	26,67	26,67
Kota Probolinggo	16,67	13,33
Kota Pasuruan	3,33	3,33
Kota Mojokerto	20,00	16,00
Kota Madiun	24,14	23,33
Kota Surabaya	36,00	32,00
Kota Batu	16,67	16,67
JAWA TIMUR	20,00	19,17

Sumber:<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE5IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase perempuan di parlemen Jawa Timur meningkat dari 19,17% pada 2022 menjadi 20,00% pada 2023. keterlibatan perempuan dalam politik menunjukkan sedikit peningkatan. Meski demikian, angka ini masih jauh dari representasi ideal, mengingat perempuan mencakup separuh populasi masyarakat. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya (Wahyudi n.d.). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan, termasuk konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan sebagai pemimpin. Kualitas kesetaraan gender dalam hal politik tidak semata tercapai melalui peningkatan keterwakilan. Pertanyaan utama adalah apakah keterwakilan tersebut sifatnya hanya sekedar representasi untuk memenuhi kuota atau partisipasi yang bersifat substansi (Sutri Destemi Elsi et al. 2022).

Kemudian, tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada tahun 2018, terdapat sebanyak 8,501/kelurahan di provinsi Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, faktanya posisi kepala desa/lurah didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah 8,102 orang (95,3%), sementara Perempuan hanya 399 orang (4,7%). Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan

Perempuan dalam posisi kepemimpinan di Tingkat desa/kelurahan di Jawa Timur masih sangat rendah.

Masih dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi Perempuan yang berada di posisi manajerial menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2021 sekitar 32,50 % , ditahun 2022 adanya penurunan menjadi 32,26% dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan menjadi 35,02%. Mencerminkan adanya kesenjangan gender yang signifikan di berbagai daerah. Dalam konteks ini Jawa Timur menduduki urutan keempat tertinggi dengan angka 37,86% setelah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah serta Gorontalo. Angka tersebut bisa dikatakan relative moderat, namun masih jauh dari ideal.

Penelitian ini dikaji menggunakan Teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Dimana teori konstruksi sosial muncul dari pertanyaan Berger tentang apa itu realitas. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena dominasi dua paradigma filosofis; empirisme dan rasionalisme. Melalui konsep pengetahuan, Berger akhirnya berhasil menjawab pertanyaannya dengan rumusan “realitas objektif” dan “realitas subjektif” (Sulaiman, 2016 dalam Putra and Harianto 2022).

Dalam teori konstruksi sosial terdapat tiga proses dialektis yang dijelaskan oleh Luckman dan Peter L. Berger, ketiga proses dialektis itu meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses dialektis tersebut tentunya berjalan sebagaimana masyarakat terus bergerak. Proses ini merupakan proses yang di dalamnya melibatkan masyarakat sebagai subjek. Masyarakat sebagai sebuah realitas subjektif merupakan sebuah institusional yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang telah tertanam, baik itu pengetahuan, kepercayaan, dan cara bertindak (tindakan), ketiga nilai-nilai ini sangat berpengaruh dalam proses dialektis masyarakat (Asmanidar, 2021).

Teori konstruksi sosial digunakan untuk mengkaji penelitian ini dengan tiga tahapan, tahap awal yaitu eksternalisasi, Dimana masyarakat menciptakan norma dan nilai yang mencerminkan pandangan mereka tentang peran perempuan dan laki-laki. Dalam konteks kepemimpinan, stereotip gender yang menganggap laki-laki lebih cocok memimpin karena dianggap lebih tegas dan rasional adalah hasil dari proses pencurahan nilai-nilai patriarkal yang dominan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari bagaimana peran

tradisional perempuan sering kali dibatasi pada ranah domestik, sementara kepemimpinan dianggap sebagai domain laki-laki.

Kemudian, norma dan nilai yang diciptakan melalui eksternalisasi ini mengalami objektivasi, yaitu proses di mana pandangan ini dianggap sebagai kenyataan yang tak terbantahkan. Misalnya, pandangan bahwa perempuan tidak cukup tegas untuk menjadi pemimpin mulai diterima secara luas sebagai "fakta sosial" yang valid, yang diperkuat oleh media, pendidikan, dan praktik sosial yang terus mereproduksi stereotip tersebut. Sebagai contoh, dalam Pilgub Jawa Timur 2024, meskipun semua kandidat adalah perempuan, banyak masyarakat masih skeptis terhadap kemampuan mereka memimpin, karena pandangan ini telah menjadi realitas objektif yang sulit digugat. Tahap terakhir adalah internalisasi, di mana individu menyerap norma dan nilai yang telah diobjektivasi ke dalam kesadaran mereka. Proses ini memengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak. Dalam kasus kepemimpinan perempuan, individu, baik laki-laki maupun perempuan, cenderung mengadopsi pandangan yang telah terbentuk bahwa perempuan kurang kompeten dibandingkan laki-laki sebagai pemimpin. Namun, pengalaman konkret melihat keberhasilan perempuan dalam memimpin, seperti figur Tri Rismaharini, dapat menjadi bentuk internalisasi baru yang positif, yang mampu menantang stereotip lama dan membuka jalan bagi perubahan persepsi masyarakat.

Kajian mengenai Perempuan dalam Politik telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, seperti yang ditunjukkan dalam riset yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Pertama, Penelitian oleh Siti Nimrah dan Sakaria dalam jurnal *The Politics* (2015) berjudul "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014)" menyoroti keterlibatan perempuan di ranah politik formal yang masih minim meskipun telah disahkannya undang-undang keterwakilan perempuan. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang menyebabkan kegagalan perempuan dalam pemilu legislatif, yaitu budaya patriarki, peran partai politik, pengaruh media, dan kurangnya jaringan antara organisasi perempuan, LSM, dan partai politik. Budaya patriarki menjadi faktor dominan yang memperkuat persepsi bahwa politik

adalah dunia laki-laki, sementara perempuan dianggap lebih cocok di ranah domestik.

Penelitian kedua oleh Very Wahyudi dalam *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam* (2018) berjudul "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender" mengkaji rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia. Penelitian ini menyoroti budaya patriarki yang menjadi kendala utama dalam mengubah pandangan masyarakat bahwa politik adalah ranah publik yang dianggap tidak cocok untuk perempuan. Meskipun terdapat undang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan sebesar 30% di lembaga legislatif, angka partisipasi perempuan masih rendah. Penelitian ini juga membahas bagaimana sistem sosial dan politik hegemonik menghambat perempuan untuk berkompetisi secara setara dengan laki-laki, serta pentingnya affirmative action untuk memperkuat representasi perempuan di arena politik.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Siti Nimrah dan Sakaria (2015), menyoroti hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik, terutama budaya patriarki, peran partai politik, dan pengaruh media. Penelitian Very Wahyudi (2018) juga mengulas keterbatasan representasi perempuan dalam politik Indonesia, dengan fokus pada sistem sosial dan politik hegemonik yang menghambat perempuan untuk berkompetisi secara setara. Namun, sebagian besar penelitian ini berfokus pada faktor struktural, budaya patriarki secara umum, atau implementasi kebijakan afirmatif tanpa membahas secara spesifik persepsi kelompok muda, khususnya mahasiswa, terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks tertentu.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan fokus pada konstruksi sosial yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap kepemimpinan perempuan, terutama dalam konteks unik Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024, di mana semua kandidat adalah perempuan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dinamika persepsi berdasarkan gender, latar belakang budaya, dan geografis mahasiswa yang sebelumnya belum banyak dikaji. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang potensi perubahan konstruksi sosial terkait kepemimpinan perempuan di kalangan generasi muda yang lebih progresif, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, yaitu konstruksi sosial terhadap perempuan sebagai pemimpin dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi mahasiswa secara detail, khususnya terkait aspek budaya, gender, dan norma sosial. Wawancara mendalam digunakan sebagai metode utama karena memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan interpretasi mereka secara bebas. Dengan wawancara ini, peneliti dapat memahami bagaimana latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup memengaruhi cara informan memaknai peran perempuan sebagai pemimpin.

Proses wawancara berlangsung selama 45-60 menit per-sesi, menggunakan daftar pertanyaan semi-terstruktur. Pertanyaan mencakup tema utama, seperti pandangan informan tentang kepemimpinan perempuan, pengalaman mereka terkait norma sosial gender, serta tanggapan terhadap calon gubernur perempuan di Pilgub Jawa Timur 2024. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring, tergantung pada situasi dan preferensi informan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan total 12 mahasiswa, terdiri dari 6 mahasiswa ber-KTP Jawa Timur dan 6 mahasiswa dari luar Jawa Timur yang saat ini sedang berkuliah di Surabaya. Informan yang dipilih berkriteria mahasiswa yang berkuliah di Jawa Timur, berusia 18-25 tahun dan berasal dari beragam program studi, seperti ilmu sosial, politik, Psikologi, ilmu Pendidikan, ekonomi, dan Teknik. Untuk memberikan sudut pandang lintas disiplin. Variasi ini dimaksudkan untuk menangkap perbedaan persepsi antara mahasiswa lokal dan perantauan terhadap konstruksi sosial tentang perempuan sebagai pemimpin. Data yang terkumpul kemudian ditranskripsi dan dianalisis secara tematik, melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi. Pertama, dilakukan triangulasi data, yaitu membandingkan temuan dari wawancara dengan beberapa informan serta analisis konten media yang relevan. Kedua, dilakukan cross-check antar temuan untuk memastikan

konsistensi dan keakuratan data dari berbagai informan. Ketiga, diterapkan peer debriefing, yaitu diskusi dengan rekan peneliti untuk memvalidasi interpretasi data dan meminimalkan bias. Keempat, digunakan member checking, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud mereka. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan hasil penelitian menggambarkan fenomena yang diteliti secara valid, reliabel, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Persepsi mahasiswa terhadap kepemimpinan Perempuan

Persepsi mahasiswa terhadap kepemimpinan perempuan menunjukkan dinamika yang menarik, terutama dalam konteks Pilgub Jawa Timur 2024. Banyak mahasiswa, terutama perempuan, mengungkapkan pandangan positif terhadap kemampuan perempuan untuk memimpin, menekankan kelebihan seperti empati, kolaborasi, dan kemampuan manajerial. Hal ini terlihat dari pengakuan mereka terhadap figur pemimpin perempuan seperti Tri Rismaharini, yang dianggap berhasil memimpin dengan hasil nyata. Sebaliknya, mahasiswa laki-laki cenderung lebih skeptis, memandang perempuan sebagai pemimpin yang kurang tegas dan rasional. Namun, beberapa mahasiswa laki-laki juga mengakui pentingnya kompetensi individu daripada gender, yang menunjukkan adanya perubahan pandangan di kalangan generasi muda.

Informan pertama, berinisial RM, merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. RM mengemukakan pandangannya terkait konstruksi sosial yang telah lama melekat pada perempuan dalam dunia politik.

Ketika ditanya mengenai pandangan bahwa perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, lemah, dan tidak pantas menjadi pemimpin, RM menjawab, “*Kenapa perempuan harus selalu di bawah jika bisa setara dengan lelaki?*” Pernyataan ini menunjukkan adanya harapan terhadap kesetaraan gender yang mulai terbentuk dalam lingkungannya. Menurut RM,

perempuan di Indonesia telah menunjukkan kemampuan yang hampir setara dengan laki-laki. Ia menambahkan, *“Hal yang benar-benar menakjubkan karena dari sini bisa dilihat bahwa beberapa perempuan di Indonesia bisa menduduki atau hampir bisa setara dengan laki-laki.”*

Terkait kinerja perempuan di ranah politik, RM menyatakan bahwa kinerja perempuan tidak kalah baik dibandingkan dengan laki-laki yang juga terjun ke dunia politik. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang setara dalam kontribusinya terhadap sektor politik. Namun, RM juga mengakui bahwa nilai-nilai sosial dan budaya di lingkungannya yang masih bersifat patriarkal sangat memengaruhi pandangan terhadap kepemimpinan perempuan. Ia menyatakan, *“Lingkungan saya kebanyakan patriarki dan masih menjunjung tinggi bahwa kekuasaan hanya milik kaum Adam (laki-laki).”*

RM juga berbagi pengalaman pribadinya mengenai stereotip gender yang sering kali merendahkan perempuan sebagai pemimpin. Ia menyampaikan, *“Pernah, saya sendiri contohnya. Ada yang bilang ‘perempuan kalau derajatnya tidak di bawah laki-laki terus mau di mana,’ seakan-akan perempuan tidak pantas menjadi pemimpin dan memiliki karir yang bagus.”* Pernyataan ini mengungkapkan bagaimana stereotip gender masih berakar kuat di masyarakat.

Dalam pandangannya, stereotip gender memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat mengenai calon pemimpin perempuan. RM menegaskan, *“Sangat berpengaruh, apalagi yang memang pikirannya sangat patriarki. Biasanya warga desa pelosok di tempat tinggal saya lebih memilih calon laki-laki daripada perempuan karena kebanyakan persepsi masyarakat bahwa perempuan kerjanya pasti tidak becus atau tidak sebaik kinerja laki-laki.”*

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki potensi besar dalam kepemimpinan, hambatan berupa stereotip gender yang patriarkal masih menjadi tantangan utama dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan setara.

Informan kedua, berinisial N, seorang mahasiswa di salah satu PTN di Surabaya, mengemukakan bahwa budaya patriarki di lingkungannya berpengaruh besar terhadap pandangan masyarakat terhadap perempuan. Menurut N, perempuan sering kali terjebak dalam kontradiksi stereotip: ketika menunjukkan empati dan kelembutan dianggap tidak tegas, tetapi ketika menunjukkan ketegasan dianggap tidak feminin. Pernyataan ini mencerminkan tahap objektivasi dalam teori Berger, di mana stereotip gender telah menjadi "realitas objektif" yang diterima oleh masyarakat melalui konstruksi budaya patriarki.

N juga menyoroti potensi perubahan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks Pilgub Jawa Timur 2024. Ia menyatakan bahwa keikutsertaan tiga calon gubernur perempuan dapat mengubah pandangan masyarakat, bukan melalui perdebatan pantas atau tidaknya, tetapi berdasarkan kualitas kinerja mereka, dengan mengatakan, *"Sekarang kualitas dia terhadap apa yang dia lakukan saja selama menjabat."* Ini mencerminkan tahap awal eksternalisasi, di mana individu mulai memperkenalkan narasi baru yang menekankan kompetensi daripada jenis kelamin.

Selanjutnya, ada Informan DZN mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. DZN mengemukakan pendapatnya mengenai tiga calon gubernur perempuan dalam Pilgub Jawa Timur 2024, DZN menyatakan, *"Hal yang benar-benar menakjubkan karena dari sini bisa dilihat bahwa beberapa perempuan di Indonesia bisa menduduki atau hampir bisa setara dengan laki-laki."* Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang mendukung kesetaraan gender, di mana kehadiran perempuan dalam posisi politik dianggap sebagai langkah maju.

Lebih lanjut, DZN menambahkan, *"Gender tidak menentukan kemampuan memimpin; yang penting adalah kapabilitas."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa DZN menolak internalisasi stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang kurang mampu dalam memimpin. Dalam perspektif teori Berger, pandangan ini dapat dilihat sebagai bentuk eksternalisasi, yaitu upaya untuk menciptakan konstruksi

sosial baru yang lebih menekankan kompetensi individu daripada jenis kelamin.

DZN memberikan contoh konkret dari keberhasilan kepemimpinan perempuan, yaitu Bu Risma saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Ia menjelaskan, *“Dari situ saya bisa melihat bahwa seorang perempuan yang menjadi wali kota bisa sangat disegani dan disukai banyak masyarakat kota Surabaya dikarenakan kinerjanya yang begitu baik. Beliau menunjukkan bagaimana seorang pejabat atau perempuan harus berkontribusi untuk sekitarnya. Dan bukti nyatanya adalah Surabaya menjadi lebih terlihat bagus, cantik, dan tata wilayah kotanya menarik banyak masyarakat luar daerah.”*

Pernyataan ini mencerminkan tahap objektivasi, di mana keberhasilan Bu Risma menjadi realitas objektif yang dapat dirujuk oleh masyarakat sebagai bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam kepemimpinan. Pengalaman ini juga menjadi argumen untuk melawan stereotip gender yang selama ini dianggap membatasi peluang perempuan dalam politik.

Ketika ditanya mengenai pengaruh stereotip gender terhadap persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin perempuan, DZN menjawab, *“Stereotip gender masih memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin perempuan, dengan anggapan bahwa perempuan kurang tegas atau emosional. Hal ini sering menghambat kesempatan kepemimpinan bagi perempuan, meskipun mereka kompeten.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tahap internalisasi stereotip gender masih berlangsung di masyarakat, di mana persepsi yang merendahkan perempuan telah menjadi bagian dari pemahaman kolektif. Namun, DZN juga menekankan bahwa semakin banyak perempuan yang sukses dalam kepemimpinan, sehingga lambat laun pandangan masyarakat mulai berubah. Ia menambahkan, *“Namun, seiring waktu, semakin banyak perempuan sukses dalam kepemimpinan, yang membantu mengubah pandangan tersebut.”*

Informan selanjutnya, yaitu KA mahasiswi yang berdomisili asli Surabaya. KA menyatakan bahwa, *“Perempuan semakin diakui sebagai pemimpin yang kompeten, meskipun masih ada tantangan terkait stereotip gender yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun stereotip gender masih mengakar, keberhasilan perempuan dalam memimpin, seperti yang ditunjukkan oleh Bu Risma, mulai membangun pengakuan atas kompetensi perempuan dalam kepemimpinan.

Pandangan ini sejalan dengan tahap objektivasi dalam teori Berger, di mana pengalaman nyata perempuan yang berhasil memimpin menjadi bukti yang diakui oleh masyarakat sebagai realitas objektif. Keberhasilan tersebut menciptakan legitimasi baru yang dapat digunakan untuk menentang stereotip gender.

KA memberikan contoh konkret keberhasilan Bu Risma, dengan mengatakan, *“Nyatanya selama 10 tahun Kota Surabaya dipimpin oleh wali kota perempuan bisa maju pesat.”* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa hasil nyata dari kepemimpinan perempuan, seperti perbaikan infrastruktur, tata kota, dan kemajuan ekonomi di Surabaya, dapat menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam memimpin.

Hal ini mencerminkan tahap objektivasi, di mana pengalaman Bu Risma sebagai wali kota menjadi referensi yang membangun narasi baru dalam masyarakat. Keberhasilan ini membantu mendekonstruksi pandangan lama yang menganggap perempuan tidak pantas memegang posisi kepemimpinan.

KA juga mencatat bahwa perempuan semakin berani maju dalam dunia politik tanpa khawatir diintimidasi. Ia mengatakan, *“Perempuan sudah semakin berani maju dalam dunia politik tanpa khawatir diintimidasi.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan kini lebih percaya diri untuk bersaing di ranah politik, meskipun masih menghadapi tantangan dari stereotip gender yang berlaku.

Dalam perspektif teori Berger, keberanian ini dapat dipahami sebagai bagian dari eksternalisasi, di mana perempuan mulai menunjukkan perlawanan terhadap norma lama dan menciptakan realitas baru yang menegaskan kemampuan mereka dalam politik.

KA juga berbagi pengalaman bahwa perempuan sering kali dipandang tidak pantas menjadi pemimpin. Ia menyebut, "*Pernah, ada salah satu calon kepala daerah yang meremehkan lawannya karena lawannya tersebut adalah perempuan.*" Pengalaman ini mencerminkan tahap internalisasi, di mana stereotip gender yang telah diobjektivasi dalam budaya masyarakat diterima dan diadopsi oleh individu, sehingga memengaruhi cara mereka memandang kepemimpinan perempuan.

Namun, dengan memberikan contoh nyata keberhasilan Bu Risma, KA berharap masyarakat dapat menghilangkan pandangan bahwa perempuan lemah dan tidak pantas menjadi pemimpin. Ini menunjukkan bahwa pengalaman objektif dapat menjadi alat untuk melawan internalisasi stereotip gender yang merugikan.

Kemudian ada informan ARY, mahasiswa di salah satu PTN yang berada di Surabaya. ARY menyatakan, "*Ya mungkin calgub di-setting cewe semua, suaranya juga lebih banyak cewe daripada yang cowo.*" Pernyataan ini mencerminkan bahwa ARY menyadari kehadiran tiga calon gubernur perempuan dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Ia juga menyoroti potensi dukungan suara yang lebih besar dari pemilih perempuan dibandingkan laki-laki.

Pandangan ini dapat dihubungkan dengan tahap objektivasi dalam teori Berger, di mana keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan telah menjadi bagian dari realitas sosial yang diakui. Namun, pengakuan ini belum sepenuhnya disertai dengan keyakinan terhadap kompetensi perempuan, sebagaimana terlihat dari nada skeptis dalam pernyataannya.

ARY juga menyatakan, "*Ya bisa jadi aja 3 calon itu uangnya banyak.*" Pernyataan ini menunjukkan pandangan bahwa faktor ekonomi, seperti politik uang, mungkin memainkan peran penting dalam keberhasilan

perempuan sebagai calon gubernur. Sikap ini mencerminkan skeptisisme terhadap legitimasi dan kompetensi calon perempuan, mengalihkan fokus dari kinerja dan kapabilitas mereka ke aspek material.

Dalam perspektif teori Berger, pandangan ini mencerminkan internalisasi norma patriarki yang mendasari keraguan terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin. Internalitas stereotip ini membentuk pandangan yang cenderung meremehkan keberhasilan perempuan dalam politik dengan mengaitkannya pada faktor eksternal, seperti finansial, daripada kompetensi individu.

Pernyataan ARY mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, di mana keberhasilan mereka sering kali dipertanyakan atau dihubungkan dengan faktor-faktor di luar kapabilitas pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial terkait kepemimpinan perempuan masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarki yang merendahkan legitimasi perempuan dalam politik.

Meskipun ARY mengakui bahwa perempuan memiliki potensi untuk memperoleh dukungan lebih besar dari pemilih perempuan, ia tidak mengekspresikan dukungan penuh terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin. Sikap ambivalen ini mencerminkan resistensi terhadap perubahan konstruksi sosial yang mendukung kesetaraan gender dalam politik.

Informan berikutnya yakni KRDN (laki-laki), mahasiswa baru di salah satu PTN yang berada di Jawa timur. KRDN mengatakan pendapatnya bahwa:

“Menurut ku cewek itu kayak fisiknya kurang terus pemikirannya kurang matang sama terus masyarakat memilih cowok itu untuk masa kedepannya pemikirannya matang gampang di kasih saran terus cewek agak kurang gitu”

“Ada tapi e”

Terjemahan:

"Menurut saya, perempuan itu fisiknya kurang mendukung dan pemikirannya kurang matang. Masyarakat cenderung memilih laki-laki karena dianggap

lebih matang, mudah diberi saran, sementara perempuan dianggap kurang seperti itu."

“Ada tapinya”

KRDN mengutarakan opini yang cukup tradisional dan patriarki dengan mengatakan: *"Cewek itu kayak fisiknya kurang terus pemikirannya kurang matang sama terus masyarakat memilih cowok itu untuk masa depan."*

Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki stereotype bahwa perempuan secara fisik dan intelektual belum sempurna dan tidak layak menjadi pemimpin utama. Selain itu, ia juga mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung lebih mempercayai laki-laki daripada perempuan dalam membuat keputusan strategis.

Namun, KRDN juga menunjukkan bahwa pandangannya sedikit berubah saat dia berkomentar: *"Sekarang itu orang-orang yang pemikiran maju terus kayak pemuda-pemuda itu ga mandang cowok atau cewek semua itu tertarik sama visi dan missinya."*

Ini menunjukkan bahwa ia mulai sadar bahwa visi dan misi sebuah program atau individu adalah yang paling penting, bukan jenis kelamin. Oleh karena itu, ia mengakui bahwa generasi muda saat ini lebih fokus pada ideologi dan tujuan daripada jenis kelamin.

Dari pernyataan KRDN, terlihat bahwa ia masih memiliki pandangan tradisional yang menganggap perempuan tidak lengkap sebagai pemimpin. Namun, ia juga menunjukkan kemampuan adaptasi dan perkembangan pendidikan yang makin modern, sehingga ia mulai memprioritaskan visi dan misi atas jenis kelamin.

Pernyataan awalnya tentang perempuan "cewek" menunjukkan bahwa masih ada stereotip yang kuat dalam masyarakat, tetapi pernyataan lanjutan tentang generasi muda yang fokus pada visi dan misi menunjukkan adanya pergeseran pandangan menuju yang lebih inklusi dan demokratis.

Kemudian, 6 informan berikutnya yaitu mahasiswa perantauan atau mahasiswa yang ber-KTP luar Jawa Timur dan saat ini sedang berkuliah di Jawa Timur. Informan IL, merupakan seorang mahasiswi asal Nias Selatan yang sedang menempuh pendidikan di salah satu PTN di Surabaya, menggambarkan bagaimana perempuan di masyarakatnya sering dianggap rendah, terutama dalam lingkup keagamaan dan rumah tangga. Ia menyatakan, *“Di zaman 90-an, masyarakat memandang perempuan hanya bisa mengandalkan pengetahuan tanpa beraksi.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa stereotip gender telah lama menjadi bagian dari budaya patriarkal di wilayahnya, yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Lebih lanjut, IL menambahkan, *“Perempuan dalam kepemimpinan dan pekerjaan setara, namun dalam lingkup keagamaan dan rumah tangga perempuan selalu rendah.”* Pandangan ini mencerminkan tahap internalisasi, di mana nilai-nilai patriarkal yang telah diobjektivasi dalam masyarakat diadopsi oleh individu sebagai bagian dari realitas sosial mereka.

Berikutnya informan AM, mahasiswi asal Majalengka yang saat ini berkuliah di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), menyampaikan rasa bangga terhadap keberanian perempuan yang maju dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Ia mengatakan, *“Senang dan bangga, soalnya di pilkada Jawa Timur sendiri ketiga calonnya yang perempuan menandakan bahwa tidak ada perbedaan gender. Biasanya kan ada persepsi bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Di samping itu, ketiga calon juga mempunyai kapasitas dan visi misi yang bagus dan berkorelasi pada kemajuan Jawa Timur juga.”*

Pernyataan ini mencerminkan tahap eksternalisasi dalam teori Berger, di mana perempuan mulai menunjukkan bahwa mereka mampu memimpin dan memiliki visi yang jelas. AM juga menggarisbawahi bahwa keterlibatan perempuan dalam Pilgub ini dapat menjadi pemicu bagi perempuan lain untuk berani maju. Dengan demikian, eksternalisasi ini berpotensi menciptakan konstruksi sosial baru yang lebih inklusif terhadap perempuan.

AM juga menambahkan, *“Perempuan dalam kegiatan sehari-hari bisa melakukan banyak hal sekaligus, seperti mengerjakan pekerjaan rumah*

sambil merawat anak. Perempuan pun dalam melakukan tugasnya lebih teliti daripada laki-laki.” Pandangan ini memberikan perspektif bahwa perempuan memiliki kelebihan yang dapat diandalkan, baik dalam konteks kepemimpinan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Informan selanjutnya, NIRH, mahasiswi asal Cirebon yang saat ini berkuliah di salah satu PTN di Jawa Timur, menyoroti bahwa keterlibatan perempuan dalam Pilgub Jawa Timur 2024 merupakan pengakuan atas kompetensi perempuan. Namun, ia juga mencatat bahwa stereotip gender masih menjadi tantangan besar. Ia menyatakan, *“Pandangan bahwa laki-laki lebih rasional dan tegas dapat membuat orang meragukan kemampuan perempuan dalam posisi kepemimpinan.”*

Pandangan ini mencerminkan tahap internalisasi stereotip gender, di mana masyarakat menganggap laki-laki lebih layak memimpin karena dianggap lebih rasional dan tegas. Namun, NIRH juga melihat potensi positif dalam gaya kepemimpinan perempuan, dengan mengatakan, *“Perempuan memiliki kelebihan, seperti gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan partisipatif, yang dapat membawa perspektif baru dalam pengambilan keputusan.”* Pernyataan ini mencerminkan bahwa perempuan dapat menawarkan pendekatan berbeda yang justru menjadi nilai tambah dalam kepemimpinan.

Informan ASR, yaitu seorang mahasiswa luar Jawa Timur yang sedang berkuliah di UPNV Jawa Timur, menekankan bahwa dalam kepemimpinan, kompetensi lebih penting daripada gender. Ia menyatakan, *“Ga apa-apa yang penting baik dalam memimpin, bisa adil dan bijaksana.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa ASR mendukung penilaian terhadap kemampuan individu daripada membedakan berdasarkan jenis kelamin.

Namun, ASR juga mengungkapkan bahwa konstruksi sosial di lingkungannya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, yang dalam pandangannya, tidak menganjurkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Ia menyatakan, *“Memang kodratnya sebagai perempuan seperti itu, dan juga dalam agama Islam perempuan itu sebenarnya dilarang menjadi pemimpin sih.”* Pernyataan ini mencerminkan adanya kontradiksi antara pandangan

pribadi yang mendukung kompetensi perempuan dan internalisasi nilai-nilai agama yang menjadi bagian dari konstruksi sosial di lingkungannya.

Dalam perspektif teori Berger, pandangan ini mencerminkan tahap internalisasi, di mana norma agama yang telah diobjektivasi dalam masyarakat diadopsi oleh individu sebagai bagian dari realitas sosial mereka. Meskipun demikian, pernyataan ASR tentang pentingnya hasil kerja menunjukkan potensi eksternalisasi pandangan baru yang menilai kemampuan berdasarkan kapabilitas, bukan jenis kelamin.

ASR juga berbagi pengalaman bahwa masyarakat di lingkungannya cenderung meremehkan perempuan sebagai pemimpin, dengan mengatakan, *“Jika perempuan menjadi pemimpin itu agak kurang dalam menghakimi, karena perempuan itu lebih menggunakan perasaannya dan tidak tega-an, beda dengan laki-laki yang cepat mengambil keputusan dan berpikir secara logika.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa stereotip gender masih mendominasi persepsi masyarakat, yang menganggap perempuan terlalu emosional untuk memimpin.

Infroman berikutnya yaitu AAF, seorang mahasiswa laki-laki luar Jawa Timur yang sedang berkuliah di Surabaya, memiliki pandangan yang lebih progresif tentang kepemimpinan perempuan. Ia merasa takjub dan antusias terhadap fakta bahwa tiga calon gubernur dalam Pilgub Jawa Timur 2024 adalah perempuan. AAF menyatakan, *“Takjub dan sangat bersemangat.”* Pernyataan ini menunjukkan dukungannya terhadap keberanian perempuan untuk maju dalam politik.

Menurut AAF, perempuan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif, tergantung pada bagaimana mereka dipandang dan dinilai oleh masyarakat. Ia mengatakan, *“Bisa saja dinilai dari siapa yang menilai,”* yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap pemimpin perempuan sangat bergantung pada sudut pandang individu. Pernyataan ini mencerminkan tahap objektivasi, di mana persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin mulai bergeser, meskipun perubahan ini masih bergantung pada konteks sosial di mana mereka dinilai.

AAF juga mencatat bahwa lingkungan keluarganya sangat berpikiran maju, berbeda dengan masyarakat yang menganggap perempuan lemah. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang kepemimpinan perempuan dapat berbeda di setiap lingkungan, tergantung pada nilai-nilai yang diinternalisasi oleh individu. Dalam teori Berger, pandangan ini mencerminkan potensi eksternalisasi narasi baru yang mendukung kesetaraan gender dan menantang norma patriarki yang ada.

Ketika ditanya apakah keikutsertaan tiga calon perempuan dalam Pilgub Jawa Timur 2024 dapat mengubah persepsi masyarakat, ASR menyatakan, *“Bisa jadi, tapi bukan berarti lebih pantas menjadi pemimpin daripada laki-laki, tapi memang momennya saja 3 calon itu lebih tinggi jabatannya.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa ASR masih memandang perempuan dengan keraguan tertentu, meskipun ia mengakui bahwa kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat membawa perubahan persepsi.

Sebaliknya, AAF menunjukkan antusiasme lebih besar terhadap potensi perubahan ini, dengan menyatakan bahwa kehadiran perempuan dalam Pilgub memberikan contoh nyata tentang kemampuan perempuan untuk memimpin. Dalam perspektif teori Berger, pandangan ini mencerminkan tahap awal eksternalisasi narasi baru yang mendukung inklusi perempuan dalam kepemimpinan politik.

Informan terakhir, berinisial P, seorang mahasiswi asal Bandung Barat yang saat ini berkuliah di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), menyampaikan pandangannya tentang potensi perempuan dalam kepemimpinan politik. P menganggap Pilgub Jawa Timur 2024 sebagai langkah maju dalam kesetaraan gender di bidang politik. Ia menyatakan, *“Pilgub Jawa Timur 2024 dengan ketiga calon gubernur perempuan ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di bidang politik. Ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana perempuan dapat memimpin dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, serta mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik di masa depan.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan sebagai calon gubernur dapat menjadi katalis perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin. Dalam konteks teori Berger, pandangan P mencerminkan tahap eksternalisasi, di mana narasi baru tentang kesetaraan gender sedang dibangun melalui partisipasi aktif perempuan dalam politik.

P juga memberikan contoh kepemimpinan perempuan yang sukses, seperti Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014–2019. Ia mengatakan, *“Kinerja perempuan dalam politik dapat menjadi contoh yang baik tentang bagaimana perempuan dapat memimpin dan memberi dampak positif.”* Keberhasilan Susi Pudjiastuti dinilai sebagai bukti nyata bahwa perempuan mampu memimpin dengan keberanian dan mengambil keputusan yang inovatif.

Dalam perspektif teori Berger, pengalaman Susi Pudjiastuti dapat dilihat sebagai bagian dari tahap objektivasi, di mana keberhasilan perempuan dalam kepemimpinan menjadi referensi konkret yang mengubah persepsi masyarakat tentang kemampuan perempuan. Contoh ini memperkuat narasi bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang efektif, sama halnya dengan laki-laki.

P juga menyampaikan bahwa tidak ada alasan untuk meremehkan kemampuan perempuan dalam memimpin. Ia menganggap bahwa Pilgub Jawa Timur 2024 adalah kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki. Namun, P juga menekankan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata tergantung pada gender, melainkan pada kemampuan individu. Ia menyatakan, *“Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menjadi pemimpin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.”*

Pandangan ini selaras dengan tahap internalisasi, di mana P menunjukkan penerimaan terhadap narasi baru yang mendukung kompetensi individu tanpa membedakan gender. Dalam hal ini, konstruksi sosial yang mendukung kesetaraan gender mulai diadopsi oleh individu sebagai bagian dari realitas sosial mereka.

Konstruksi sosial ini, sebagaimana dijelaskan oleh Peter L. Berger dalam teori konstruksi sosialnya, adalah proses di mana individu dan kelompok sosial menginternalisasi dan mengobjektifkan pandangan yang kemudian di luar kendali individu menjadi norma sosial yang diterima secara umum.

Dalam konteks Pilgub Jatim 2024, pandangan sosial terhadap kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh stereotip gender yang telah lama ada, yang mengasosiasikan kepemimpinan dengan sifat-sifat maskulin, seperti ketegasan dan kekuatan fisik atau emosional. Stereotip ini terlihat jelas dalam pendapat sejumlah informan yang masih menganggap perempuan kurang tegas atau kurang matang dalam berpikir dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh, informan KRDN dan NIRH menunjukkan pandangan yang lebih konservatif, di mana mereka beranggapan bahwa perempuan secara fisik dan intelektual kurang memenuhi kriteria kepemimpinan yang dianggap ideal. Ini sejalan dengan teori Berger mengenai objektivasi, di mana pandangan patriarkal tentang peran perempuan yang lemah dan tidak cocok memimpin telah terbentuk dalam masyarakat dan dianggap sebagai realitas yang tak terbantahkan.

Namun, meskipun konstruksi sosial ini masih kuat, perubahan mulai terlihat, terutama di kalangan generasi muda. Informan seperti RM, KA, dan AAF, misalnya, menunjukkan sikap yang lebih progresif, mendukung kesetaraan gender, dan mengakui kemampuan perempuan untuk memimpin dengan sukses. Ini menunjukkan adanya eksistensi eksternalisasi dalam masyarakat, di mana pandangan baru yang lebih inklusif mulai berkembang dan diterima secara luas. Sebagai contoh, RM memberikan dukungan terhadap figur pemimpin perempuan yang sukses seperti Tri Rismaharini, yang telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin Kota Surabaya dengan hasil yang signifikan. Ini mencerminkan bahwa melalui pengalaman konkret dan keberhasilan yang dapat dilihat, konstruksi sosial mengenai kemampuan perempuan dalam kepemimpinan dapat berubah dan menghasilkan pemahaman baru yang lebih positif.

Perubahan pandangan ini juga terlihat pada beberapa informan lain yang mulai menganggap bahwa kepemimpinan seharusnya dilihat dari segi kapabilitas individu, bukan gender. Sebagai contoh, DZN dan ASR menegaskan pentingnya kompetensi dan kemampuan dalam memimpin daripada memandang seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam hal ini, mereka mencoba untuk mengganti pandangan sosial yang sudah mapan melalui eksternalisasi, dengan menekankan bahwa kemampuan individu adalah hal yang lebih relevan daripada gender mereka. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam paradigma sosial yang semakin mengarah pada kesetaraan gender dalam kepemimpinan.

Di sisi lain, meskipun banyak perubahan pandangan, beberapa informan tetap menunjukkan ambivalensi terhadap calon gubernur perempuan. ARY, misalnya, mengungkapkan ketidakpastian mengenai legitimasi perempuan dalam Pilgub Jatim 2024, dengan menunjukkan faktor ekonomi sebagai salah satu alasan potensial keberhasilan calon perempuan. Ini mengindikasikan adanya ketidakpercayaan sosial yang masih mengakar, yang berfokus pada aspek eksternal seperti kekuatan finansial daripada kompetensi atau kemampuan kepemimpinan yang sesungguhnya. Namun, pandangan ini tetap mencerminkan dinamika konstruksi sosial, di mana peran perempuan dalam politik tetap diwarnai oleh pandangan skeptis dan keraguan terhadap kemampuan mereka.

Pembahasan

Perbedaan pandangan berdasarkan gender informan

Terdapat perbedaan signifikan antara pandangan mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap kepemimpinan perempuan. Informan perempuan umumnya mendukung gagasan bahwa perempuan mampu memimpin dan menekankan pentingnya pengalaman dan kompetensi sebagai indikator kesuksesan. Sebaliknya, mahasiswa laki-laki lebih sering mengaitkan keberhasilan perempuan dengan faktor eksternal seperti dukungan finansial atau keberuntungan. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh gender dalam membentuk persepsi, di mana mahasiswa perempuan lebih optimis terhadap perubahan, sementara mahasiswa laki-laki cenderung mempertahankan pandangan yang lebih tradisional.

Tabel 2. Perbedaan Persepsi Informan Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Pilgub Jawa Timur 2024

No.	Aspek Persepsi	Perempuan	Laki-laki
1.	Kinerja kepemimpinan perempuan dalam politik	<p>- Mayoritas informan perempuan mendukung keterlibatan perempuan dalam Pilgub Jawa Timur sebagai langkah maju untuk kesetaraan gender.</p> <p>- Contoh: <i>"Pilgub Jawa Timur 2024 dengan ketiga calon gubernur perempuan ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di bidang politik"</i> (Informan P).</p>	<p>- Beberapa informan laki-laki mendukung kesetaraan gender berdasarkan kompetensi individu.</p> <p>- Contoh: <i>"Gender tidak menentukan kemampuan memimpin; yang penting adalah kapabilitas"</i> (Informan DZN).</p>
2.	Stereotip Gender	<p>- Perempuan mengakui bahwa stereotip gender masih menjadi tantangan, seperti anggapan bahwa perempuan kurang rasional.</p> <p>- Contoh: <i>"Pandangan bahwa laki-laki lebih rasional dan tegas dapat membuat orang meragukan kemampuan perempuan dalam"</i></p>	<p>- Laki-laki cenderung menginternalisasi stereotip gender, seperti anggapan bahwa perempuan lebih emosional.</p> <p>- Contoh: <i>"Jika perempuan menjadi pemimpin itu agak kurang dalam menghakimi, karena perempuan itu lebih menggunakan perasaannya dan"</i></p>

		<i>posisi kepemimpinan” (Informan NIRH).</i>	<i>tidak tega-an” (Informan ASR).</i>
3.	Perubahan persepsi masyarakat	<p>- Informan perempuan lebih optimis bahwa keterlibatan perempuan dalam Pilgub Jawa Timur 2024 dapat mengubah pandangan masyarakat.</p> <p>- Contoh: <i>“Ini adalah kesempatan untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik di masa depan” (Informan P).</i></p>	<p>- Laki-laki mengakui bahwa keterlibatan perempuan dapat membawa perubahan, tetapi cenderung menganggapnya sebagai hasil dari situasi tertentu, bukan kesetaraan intrinsik.</p> <p>- Contoh: <i>“Momennya saja 3 calon itu lebih tinggi jabatannya” (Informan ASR).</i></p>
4.	Pengaruh lingkungan	<p>- Lingkungan patriarkal sering disebut sebagai hambatan bagi perempuan untuk maju, terutama dalam konteks rumah tangga atau agama.</p> <p>- Contoh: <i>“Dalam lingkup keagamaan dan rumah tangga perempuan selalu rendah” (Informan IL).</i></p>	<p>- Lingkungan patriarkal juga memengaruhi pandangan laki-laki, terutama yang mencampurkan norma sosial dan agama.</p> <p>- Contoh: <i>“Dalam agama Islam perempuan itu sebenarnya dilarang menjadi pemimpin” (Informan ASR).</i></p>

Tabel ini menunjukkan bahwa informan perempuan cenderung lebih optimis dan mendukung kesetaraan gender dalam Pilgub Jawa Timur 2024, sedangkan informan laki-laki menunjukkan sikap yang lebih ambivalen,

dengan dukungan yang sering kali diiringi skeptisisme terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin.

Hasil temuan ini selaras dengan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Bias gender terhadap kepemimpinan perempuan mencerminkan proses internalisasi, di mana stereotip dan nilai-nilai patriarkal telah ditanamkan dalam masyarakat melalui budaya dan pendidikan. Misalnya, asumsi bahwa perempuan kurang rasional atau kurang cocok untuk politik adalah hasil dari objektivasi budaya patriarkal, di mana norma-norma gender diperlakukan sebagai realitas yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, ada indikasi bahwa generasi muda mulai melakukan eksternalisasi pandangan baru yang lebih inklusif, seperti menilai kepemimpinan berdasarkan kompetensi individu, bukan gender. Proses ini menunjukkan potensi perubahan konstruksi sosial yang lebih progresif, terutama di kalangan mahasiswa.

Budaya Jawa Timur, yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, menciptakan bias gender yang signifikan terhadap peluang perempuan untuk menjadi pemimpin. Dalam budaya ini, perempuan sering kali diasosiasikan dengan peran domestik, sementara laki-laki dianggap lebih layak untuk mengambil peran publik, termasuk kepemimpinan politik. Bias ini terlihat dari stereotip bahwa perempuan dianggap emosional, kurang tegas, dan tidak memiliki kemampuan strategis seperti laki-laki. Stereotip ini telah menjadi bagian dari konstruksi sosial yang diinternalisasi oleh masyarakat melalui proses pendidikan, media, dan norma sosial yang diwariskan lintas generasi.

Pilgub Jawa Timur 2024, yang menampilkan tiga calon gubernur perempuan, merupakan peristiwa bersejarah yang memiliki potensi besar untuk mengubah persepsi sosial tentang kepemimpinan perempuan. Fakta bahwa perempuan mendominasi daftar calon gubernur menunjukkan bahwa perubahan sedang terjadi, setidaknya pada tingkat nominasi. Peristiwa ini dapat menjadi "titik balik" yang memperlihatkan kemampuan perempuan untuk memimpin di tingkat strategis, terutama jika mereka berhasil menunjukkan kompetensi dan visi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam Pilgub ini tidak hanya sekadar

persaingan politik, tetapi juga merupakan bentuk eksternalisasi pandangan baru dalam konstruksi sosial masyarakat. Keberhasilan calon perempuan akan menjadi bukti nyata objektivasi bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin yang efektif, sehingga memperkuat argumen untuk kesetaraan gender di arena politik. Selain itu, momentum ini dapat menginspirasi generasi muda, khususnya perempuan, untuk lebih berani memasuki dunia politik dan menantang norma-norma tradisional yang membatasi mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perubahan persepsi sosial tidak terjadi secara instan. Meskipun Pilgub ini mencerminkan kemajuan, tantangan berupa bias gender dan hambatan budaya masih perlu dihadapi. Oleh karena itu, selain dukungan dari para kandidat, peran media, institusi pendidikan, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk membentuk narasi yang mendukung kesetaraan gender. Melalui upaya kolektif, Pilgub Jawa Timur 2024 dapat menjadi simbol transformasi menuju masyarakat yang lebih inklusif dalam menerima perempuan sebagai pemimpin.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun konstruksi sosial yang merugikan perempuan dalam kepemimpinan masih ada, ada pergeseran pandangan yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Melalui teori konstruksi sosial Berger, dapat dipahami bahwa konstruksi sosial ini tidak bersifat tetap dan dapat berubah seiring dengan adanya pengalaman baru, pengaruh dari media, dan perubahan norma sosial. Keterlibatan perempuan dalam Pilgub Jawa Timur 2024 dapat menjadi momentum untuk menggantikan konstruksi sosial lama yang patriarkal dengan pandangan yang lebih setara dan inklusif terhadap kepemimpinan perempuan

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konstruksi sosial terhadap perempuan sebagai pemimpin masih sangat dipengaruhi oleh stereotip gender yang mendukung norma-norma patriarkal. Persepsi mahasiswa menunjukkan dinamika yang mencerminkan dualitas dalam pandangan mereka. Mahasiswa laki-laki cenderung mempertahankan pandangan tradisional yang skeptis terhadap kemampuan perempuan memimpin, sementara mahasiswa

perempuan lebih optimis dan mendukung gagasan bahwa perempuan dapat memimpin secara efektif berdasarkan kompetensi individu. Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024, yang seluruh kandidatnya adalah perempuan, menjadi momentum penting untuk mengkaji dan menggeser konstruksi sosial tentang kepemimpinan perempuan. Meskipun stereotip gender tetap menjadi hambatan, pengalaman konkret dari tokoh perempuan seperti Tri Rismaharini membantu membentuk pandangan baru yang lebih progresif di kalangan generasi muda. Proses ini sejalan dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, di mana eksternalisasi pandangan baru menciptakan perubahan objektivasi terhadap realitas sosial yang lebih inklusif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis, yang terbatas pada mahasiswa yang berkuliah di Jawa Timur, sehingga hasilnya belum mencerminkan pandangan masyarakat secara luas. Selain itu, representasi informan yang terbatas pada kelompok mahasiswa mungkin belum sepenuhnya menggambarkan persepsi dari kelompok masyarakat lain, seperti profesional, politisi, atau masyarakat umum. Untuk memperkuat peran perempuan dalam politik, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pendidikan gender yang menanamkan nilai kesetaraan sejak usia dini, kebijakan afirmatif yang memastikan partisipasi substansial perempuan dalam politik, kampanye kesetaraan gender untuk menantang stereotip, dan peningkatan representasi perempuan dalam posisi strategis. Upaya kolektif dari berbagai pihak akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana perempuan dapat diterima sebagai pemimpin yang setara dengan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Asmanidar. (2021). SULUK DAN PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL SALIK (TELAAH TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER DAN THOMAS LUCKMAN). *Ar-raniry*.

<http://dx.doi.org/10.22373/arj.v1i1.9488>

Astuti, D. (2020). MELIHAT KONSTRUKSI GENDER DALAM PROSES MODERNISASI DI YOGYAKARTA. *POPULIKA*.

<https://doi.org/10.37631/populika.v8i1.131>

- Aulia, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>
- Gusmansyah. (2019). Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. *ejournal.uinfabengkulu.ac.id*.
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/viewFile/233/1860>
- Handayani, d. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan: Studi Konstruksi Sosial atas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan. *Brawijaya Journal of Social Science*.
<https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2024.003.02.2>
- Noval Perdana Astiyan Putra, S. H. (2022). KONSTRUKSI SOSIAL MAHASISWA. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Siti Nimrah, S. S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *The Politics Jurnal Magister Ilmu Politik Unhas*.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/issue/view/44>
- Sutri Destemi Elsi, R. M. (2022). Pengaruh Konstruksi Sosial Budaya Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan Di Provinsi Jambi. *Journal Publicuho*.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*.
<https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- WIDODO, d. (2023). Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN POLITIK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI*.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2771>

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE5IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>

<https://unair.ac.id/dosen-sosiologi-unair-peran-perempuan-sering-dikesampingkan-dalam-bidang-politik/>

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTc5MyMx/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-kelamin-kepala-desa-lurah-dan-sekretaris-desa-kelurahan--2018.html>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwMyMy/proporsi-perempuan-yang-berada-di-posisi-managerial-menurut-provinsi.html>